

Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Analisis Semiotik Derrida dalam Gaya Komunikasi Publik Dedi Mulyadi

DOI: <https://doi.org/10.32509/petanda.v7i3.6084>

Ratna Susanti^{1*}, Zulham², Iswahyu Pranawukir³, Ema Kusuma⁴, Titiek Surya Ningsih⁴

¹Politeknik Indonusa Surakarta

Jl. K.H Samanhudi No.31, Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142

²Universitas Malikussaleh

6XMP+XPW, Kampong, Reuleut Tim., Kec. Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh

³Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957

Jl. Moch. Kahfi II No.33, RT.1/RW.5, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13550

⁴Universitas Tama Jagakarsa

Jl. TB Simatupang No.152 10, RT.10/RW.4, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530

*Email Korespondensi: ratnasusanti19@poltekindonusa.ac.id

Abstract - This study aims to analyze Dedi Mulyadi's public communication style through Derrida's semiotics, particularly the concept of deconstruction. This approach is used to uncover layers of meaning often manifested by cultural narratives, traditional symbols, and cultural expressions on digital platforms. Using a qualitative method with text and video analysis, interpretation of symbols, diction, and gestures, the study reveals that Dedi Mulyadi's communication is rich in markers of locality, simplicity, and closeness to the people. However, these meanings are not singular and remain open to deconstruction. Based on Derrida's conception, it is found that Dedi Mulyadi's communication style blurs the boundaries between the elite and the people, power and simplicity, representation and reality. His public communication style represents a deconstruction of conventional political communication practices by blending modern and traditional symbols, dissolving the boundary between the elite and the masses through the use of ambiguous yet populist. This approach also helps to reveal how the signs used by Dedi Mulyadi are highly open to multiple interpretations and continuously shifting meanings. The study recommends the importance of applying deconstructive analysis in political communication studies to better understand the dynamics of meaning and imagery within digital public spaces.

Keywords: Derrida's Semiotics; Deconstruction; Public Communication; Dedi Mulyadi; Symbolic Politics

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menganalisis gaya komunikasi publik Dedi Mulyadi melalui pendekatan semiotik Jacques Derrida, khususnya konsep dekonstruksi. Pendekatan ini digunakan untuk membongkar lapis makna yang sering tampak dalam bentuk narasi kebudayaan, simbol tradisional dan ekspresi kultural pada kanal digital. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik analisis teks dan video, serta interpretasi mendalam terhadap simbol, diksi dan *gesture*, menunjukkan bahwa komunikasi Dedi Mulyadi sarat dengan penanda lokalitas, kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat, namun makna-makna tersebut tidak tunggal dan selalu terbuka terhadap dekonstruksi. Berdasarkan konsepsi Derrida, ditemukan bahwa gaya komunikasi Dedi Mulyadi mampu mengaburkan batas antara elit dan rakyat, kekuasaan dan kesederhanaan



serta representasi dan realitas. Gaya komunikasi publik Dedi Mulyadi merepresentasikan dekonstruksi atas praktik komunikasi politik konvensional, yakni mencampurkan simbol modern dan tradisional, meleburkan batas antara elit dan rakyat menggunakan bahasa dan simbol yang ambigu namun populis. Pendekatan ini juga membantu mengungkap bagaimana tanda-tanda yang digunakan Dedi Mulyadi sangat terbuka terhadap tafsir ganda dan makna yang terus beraser. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya analisis dekonstruktif dalam studi komunikasi politik untuk memahami dinamika makna dan citra dalam ruang publik digital.

Kata kunci: Semiotika Derrida; Dekonstruksi; Komunikasi Publik; Dedi Mulyadi; Politik Simbolik

Pendahuluan

Dalam era komunikasi digital yang semakin kompleks, wacana publik tidak lagi sekadar soal penyampaian pesan secara linier dari pengirim ke penerima. Komunikasi publik, khususnya dalam ranah politik, telah bertransformasi menjadi ruang produksi simbol, makna, dan citra yang saling bertautan. Tokoh-tokoh politik memanfaatkan media sosial dan kanal digital tidak hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai panggung pertunjukan identitas, gaya, dan kedekatan dengan publik. Di tengah konteks tersebut, muncul figur seperti Dedi Mulyadi, politisi asal Jawa Barat yang dikenal dengan gaya komunikasi yang khas, mengusung narasi kebudayaan lokal, simbol-simbol tradisional, serta pendekatan yang menonjolkan kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat.

Di sisi lain, munculnya gaya komunikasi politik seperti yang diperlihatkan oleh Dedi Mulyadi juga tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya digital dan pergeseran paradigma komunikasi politik kontemporer. Dalam era *platform society*, di mana media sosial menjadi arena utama pembentukan persepsi publik, politisi dituntut untuk tampil autentik, menghibur dan terhubung secara emosional dengan masyarakat. Kehadiran tokoh politik di media sosial bukan lagi semata-mata sebagai penyampai kebijakan, melainkan sebagai *brand personality* yang memadukan narasi personal, visualisasi simbolik, hingga strategi performatif yang mampu membangun ikatan emosional dengan khalayak. Di sinilah gaya komunikasi Dedi Mulyadi menjadi menarik: ia memadukan nilai-nilai tradisional dengan estetika digital secara konsisten dan strategis.

Komunikasi Dedi Mulyadi juga mencerminkan dinamika politik populis digital, di mana garis batas antara rakyat dan elit sengaja diburamkan melalui representasi kesederhanaan, kedekatan, dan penggunaan simbol-simbol budaya lokal yang mudah dikenali publik. Sementara itu, seperti yang ditegaskan Derrida, tanda-tanda semacam itu tidak netral. Mereka dapat dibongkar, diuraikan dan ditafsirkan kembali, bahkan berpotensi menampilkan paradoks antara citra dan realitas. Dengan kata lain, pendekatan dekonstruksi mampu mengungkap bahwa gaya "merakyat" yang dibangun bisa jadi merupakan simulasi yang dikonstruksi secara sadar sebagai strategi politik, alih-alih cerminan otentik dari identitas.

Fenomena ini membuka ruang kajian semiotik yang lebih dalam. Gaya komunikasi Dedi Mulyadi bukan hanya performatif, tetapi juga sarat dengan konstruksi tanda-tanda yang bisa ditafsirkan dalam banyak lapisan makna. Dalam kerangka teori semiotika, khususnya pendekatan dekonstruksi dari Jacques Derrida, komunikasi semacam ini menghadirkan kerumitan: tanda tidak pernah memiliki makna tetap, melainkan selalu terbuka terhadap pergeseran, ambiguitas dan perbedaan (*différance*). Artinya, simbol-simbol yang digunakan Dedi Mulyadi tidak sekadar merepresentasikan identitas atau pesan tertentu, tetapi justru menggoyahkan batas-batas makna yang mapan antara elit dan rakyat, antara kekuasaan dan kesederhanaan.

Dekonstruksi sebagai metode kritis memungkinkan analisis terhadap permainan makna dalam komunikasi publik Dedi Mulyadi. Konsep ini membongkar struktur oposisi biner yang kerap hadir dalam komunikasi politik konvensional, seperti antara tradisional-modern, elit-rakyat, formal-informal. Melalui cara ini, khalayak dapat memahami bagaimana strategi komunikasi Dedi Mulyadi menampilkan performa populis yang kaya simbol namun tidak bisa ditangkap secara tunggal atau sederhana.

Studi komunikatif dewasa ini menekankan bahwa praktik politik tidak hanya berlangsung melalui narasi verbal tetapi juga melalui konstruksi tanda dan simbol—karena itu, analisis semiotika politik menjadi penting dalam memahami bagaimana makna diproduksi dan dikonsumsi dalam ruang publik. Sebagai contoh, Arif dan Jawad (2020) menunjukkan bahwa pendekatan semiotik terhadap wacana politik di Irak mengungkap sistem tanda yang secara strategis digunakan oleh aktor politik untuk memanipulasi dan menyebarkan pesan (Arif & Jawad, 2020). Sementara itu, Blaagaard dan Roslyng (2022) mengadopsi kerangka dekonstruktif dalam kajian aktivisme digital dengan menelusuri bagaimana tubuh aktivis dan simbolisme mereka direartikulasikan dalam ruang daring (“Rethinking digital activism”, (Roslyng, 2022)). Lebih jauh lagi, Normandin (2023) menerapkan gabungan semiotika Greimassian dan dekonstruksi de Manian untuk membongkar struktur retorika temporalis dalam teks politik, memperlihatkan bagaimana oposisi biner dan konstruk makna dominan dapat terbuka untuk penafsiran ulang (Normandin, 2023). Dengan demikian, integrasi semiotik dan dekonstruksi menawarkan pendekatan kritis yang tidak sekadar membaca “apa yang dikatakan”, tetapi juga “bagaimana dan untuk siapa” makna itu diprodusir dan dipertahankan dalam konteks politik.

Dengan demikian, pendekatan semiotik Derrida tidak hanya digunakan untuk memeriksa isi komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat kritis untuk melihat bagaimana makna, identitas, dan citra dikonstruksi dan dinegosiasikan secara terus-menerus dalam ruang publik digital. Kajian ini tidak hanya penting untuk memahami Dedi Mulyadi sebagai satu kasus, tetapi juga menawarkan model analisis yang dapat diterapkan dalam studi-studi komunikasi politik lainnya yang beroperasi di persimpangan antara simbol, media, dan kekuasaan.

Selain itu, pendekatan ini juga membuka ruang untuk memahami komunikasi publik sebagai proses konstruksi identitas yang terus berubah, bukan sesuatu yang tetap. Dalam konteks Dedi Mulyadi, identitas politiknya bukan sekadar hasil dari latar belakang sosial atau posisinya dalam struktur kekuasaan, melainkan hasil dari kerja semiotik yang kompleks, melalui simbol-simbol Sunda, pakaian adat, interaksi dengan masyarakat desa, hingga diksi dan gestur yang tampil dalam media digital. Semua itu adalah "tanda-tanda" yang dapat ditafsirkan secara majemuk dalam kerangka dekonstruksi.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis gaya komunikasi publik Dedi Mulyadi melalui pendekatan semiotik Derrida. Fokus analisis terletak pada bagaimana tanda-tanda yang digunakan, baik verbal maupun nonverbal, mengandung logika dekonstruksi, yang membuka kemungkinan-kemungkinan makna baru dan melampaui konstruksi komunikasi politik arus utama. Kajian ini diharapkan dapat memperluas perspektif dalam studi komunikasi politik, khususnya dengan mengintegrasikan pendekatan semiotik kritis terhadap praktik komunikasi digital kontemporer.

KERANGKA TEORI

Semiotika dan Dekonstruksi Jacques Derrida

Semiotika merupakan studi tentang tanda dan makna dalam komunikasi. Jacques Derrida memperkenalkan pendekatan dekonstruksi dalam semiotika, yang menekankan bahwa makna tidak bersifat tetap atau tunggal, melainkan selalu dalam proses pembentukan dan pergeseran melalui perbedaan (*différance*) dan penundaan makna. Dekonstruksi berupaya membongkar oposisi biner dalam teks dan menunjukkan bahwa makna selalu bersifat tidak stabil dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. (Anshori, 2018)

Inti dari pemikiran Jacques Derrida dalam ranah semiotika adalah gagasan dekonstruksi, sebuah pendekatan filosofis dan metodologis yang menantang asumsi-asumsi fundamental tentang bahasa, makna, dan struktur. Derrida tidak hanya melihat tanda sebagai entitas statis yang menyampaikan makna yang tetap, tetapi sebagai elemen dinamis yang terjalin dalam jaringan relasi yang kompleks dan tak pernah selesai. (Koci, 2019)

Konsep sentral dalam dekonstruksi adalah *différance*. Istilah neologis ini, yang tidak dapat diterjemahkan sepenuhnya ke dalam satu kata dalam bahasa Inggris, menggabungkan dua pengertian penting dari kata kerja Prancis *différer*: berbeda (*to differ*) dan menunda (*to defer*). Perbedaan (*Difference*), bagi Derrida, makna sebuah tanda tidak muncul dari dirinya sendiri atau dari korespondensinya dengan realitas eksternal yang tetap. Sebaliknya, makna lahir dari sistem perbedaan. Sebuah tanda memiliki signifikansi karena ia berbeda dari tanda-tanda lain dalam sistem semiotik. Misalnya, fonem 'b' bermakna dalam bahasa Inggris karena ia bukan 'p', 'd', atau vokal lainnya. Makna tidak hadir secara positif dalam tanda itu sendiri, melainkan muncul secara negatif melalui relasinya dengan apa yang bukan dirinya. Penundaan (*Deferral*), aspek kedua dari *différance* menekankan bahwa makna tidak pernah hadir secara penuh dan instan. Makna selalu ditunda dan dialihkan melalui rantai penanda (*chain of signifiers*). Ketika kita mencoba memahami makna sebuah kata, kita cenderung merujuknya pada kata lain, yang pada gilirannya merujuk pada kata lain lagi, dan seterusnya. Proses rujukan yang tak berujung ini menunjukkan bahwa makna selalu dalam pelarian, tidak pernah dapat ditangkap sepenuhnya dalam satu titik waktu atau satu tanda tunggal. Makna selalu "tertunda" dalam jaringan signifikasi. (Segovia, 2019)

Implikasi dari konsep *différance* sangat signifikan bagi pemahaman kita tentang bahasa dan makna. Jika makna selalu bergantung pada perbedaan dan penundaan, maka tidak ada makna yang transenden, esensial, atau sepenuhnya hadir. Setiap makna selalu bersifat relasional, kontekstual dan terbuka terhadap interpretasi lebih lanjut. Dekonstruksi secara kritis menyoroti peran oposisi biner dalam membentuk pemikiran dan struktur bahasa Barat. Oposisi-oposisi seperti hadir/absen, subjek/objek, alam/budaya, ucapan/tulisan, sering kali diatur secara hierarkis, dengan satu istilah dianggap lebih dominan atau primer daripada yang lain. Derrida berpendapat bahwa hierarki ini bersifat problematis dan tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa istilah yang dianggap sekunder atau dependen sering kali menjadi kondisi kemungkinan bagi keberadaan istilah yang dianggap primer. Misalnya, konsep "kehadiran" hanya dapat dipahami dalam relasinya dengan "ketidakhadiran," dan "tulisan," yang secara tradisional dianggap sebagai representasi sekunder dari "ucapan," justru memiliki peran konstitutif dalam membentuk bahasa dan makna. (Ruhupatty, 2021)

Melalui pembacaan dekonstruktif, Derrida berusaha untuk membongkar hierarki dalam oposisi biner dan menunjukkan saling ketergantungan dan ketidakstabilan antara kedua kutub. Hal ini tidak bertujuan untuk menghapus perbedaan, tetapi untuk mengungkapkan bagaimana batas-

batas antara kategori-kategori yang tampaknya jelas dan tetap sebenarnya bersifat cair dan dapat dinegosiasikan. (Salmon, 2023)

Dekonstruksi bukanlah metode interpretasi yang bertujuan untuk menemukan makna "sejati" atau "tersembunyi" dalam sebuah teks. Sebaliknya, dekonstruksi lebih merupakan strategi pembacaan yang kritis yang mengungkapkan kontradiksi internal, asumsi-asumsi yang mendasari, dan batas-batas inheren dalam setiap sistem representasi. Dekonstruksi menyoroti bagaimana teks (dalam pengertian luas, termasuk wacana budaya dan sistem sosial) selalu melampaui maksud penulis dan terbuka terhadap berbagai interpretasi yang tak terduga. (Agis, 2022)

Dengan demikian, teori semiotika Derrida melalui konsep *differance* dan dekonstruksi oposisi biner menawarkan perspektif radikal yang menantang pandangan tradisional tentang stabilitas dan kepastian makna. Hal tersebut menekankan fluiditas, relasionalitas dan ketidakstabilan inheren dalam bahasa dan produksi makna, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih kompleks dan nuansif tentang bagaimana kita berkomunikasi dan memahami dunia di sekitar kita.

Komunikasi Politik dan Simbolisme Budaya

Dalam konteks komunikasi politik, penggunaan simbol budaya lokal dapat memperkuat kedekatan antara politisi dan masyarakat. Simbol-simbol ini berfungsi sebagai alat untuk membangun identitas politik yang resonan dengan nilai-nilai lokal, memungkinkan politisi untuk membentuk citra yang autentik dan *relatable* di mata publik. (Krisnayana, 2016)

Penggunaan simbol-simbol budaya lokal dalam komunikasi politik melampaui sekadar retorika; ia merupakan strategi yang berakar dalam psikologi sosial dan pemahaman kolektif. Simbol-simbol ini membawa muatan emosional dan historis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ketika seorang politisi secara efektif mengartikulasikan pesan-pesannya melalui simbol-simbol ini, ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengaktifkan jaringan makna yang sudah tertanam kuat dalam ingatan dan identitas kolektif. Proses ini menciptakan rasa keterhubungan emosional dan pemahaman intuitif yang sulit dicapai melalui bahasa verbal semata.

Lebih lanjut, simbolisme budaya dalam politik berperan penting dalam konstruksi identitas politik. Dengan merujuk pada simbol-simbol yang dihargai dan diakui secara luas dalam suatu komunitas, seorang politisi berupaya untuk mengasosiasikan dirinya dan agendanya dengan nilai-nilai, tradisi, dan aspirasi bersama. Tindakan ini dapat memperkuat rasa "kita" (*in-group*) dan membangun solidaritas di antara para pendukung. Simbol-simbol tersebut menjadi semacam bahasa persatuan yang melampaui perbedaan-perbedaan individual dan kelompok, menciptakan landasan psikologis bagi dukungan politik. (Fitri & Adeni, 2020)

Di lain pihak, penggunaan simbolisme budaya dalam politik juga mengandung kompleksitas dan potensi risiko. Interpretasi terhadap simbol tidak selalu tunggal dan statis. Makna sebuah simbol dapat bervariasi antar individu, kelompok usia, latar belakang sosial, dan konteks waktu. Oleh karena itu, politisi harus memiliki pemahaman yang mendalam dan sensitif terhadap nuansa makna yang melekat pada simbol-simbol yang mereka gunakan. Kesalahan dalam interpretasi atau penggunaan simbol dapat berakibat fatal, menghasilkan kesalahpahaman, penolakan, atau bahkan kemarahan publik. (Erly Hasim, 2016)

Selain itu, proses pemilihan dan representasi simbol budaya tidak pernah sepenuhnya netral. Ia sering kali melibatkan seleksi, penekanan, dan bahkan reinterpretasi elemen-elemen budaya tertentu. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan tentang siapa yang berhak mendefinisikan dan merepresentasikan budaya, dan kepentingan siapa yang dilayani oleh penggunaan simbol-

simbol tersebut. Dalam konteks politik yang kompetitif, lawan politik dapat memanfaatkan ambiguitas atau kontradiksi dalam penggunaan simbol untuk menyerang kredibilitas dan autentisitas seorang politisi. (Lewar & Ndegong Madung, 2022)

Oleh karena itu, komunikasi politik yang efektif melalui simbolisme budaya memerlukan kecerdasan budaya (*cultural intelligence*) yang tinggi. Politisi perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang sejarah, nilai-nilai, mitos, ritual, dan artefak budaya yang relevan dengan konstituen mereka. Mereka juga perlu mahir dalam mengartikulasikan pesan-pesan politik mereka secara kreatif dan kontekstual melalui simbol-simbol tersebut, sambil tetap waspada terhadap potensi misinterpretasi dan manipulasi. (Irawatiningrum, 2020)

Lebih jauh lagi, dalam era globalisasi dan interaksi budaya yang intens, lanskap simbolisme budaya dalam politik menjadi semakin kompleks. Politisi tidak hanya berinteraksi dengan simbol-simbol lokal, tetapi juga harus mempertimbangkan pengaruh simbol-simbol global dan bagaimana keduanya dapat berinteraksi dan bernegosiasi dalam benak pemilih. Kemampuan untuk memadukan simbolisme lokal dan global secara strategis dapat menjadi aset penting dalam membangun citra politik yang relevan dan menarik bagi audiens yang beragam. (Sarazqiah et al., 2025)

Singkatnya, komunikasi politik melalui simbolisme budaya adalah alat yang ampuh untuk membangun kedekatan, memperkuat identitas, dan memobilisasi dukungan. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam, penggunaan yang bijaksana, dan kesadaran akan kompleksitas interpretasi dan representasi simbol-simbol budaya dalam konteks politik yang dinamis.

Komunikasi Digital dan Representasi Identitas

Era digital telah mengubah cara politisi berkomunikasi dengan publik. Media sosial menjadi platform utama bagi politisi untuk membentuk dan menyebarkan identitas mereka. Dalam konteks ini, representasi identitas melalui media digital melibatkan strategi komunikasi yang memadukan narasi personal, simbol budaya dan interaksi langsung dengan audien untuk membangun citra yang diinginkan. (Sedighi et al., 2022)

Era digital, dengan karakteristiknya yang serba cepat, interaktif, dan visual, telah merevolusi lanskap komunikasi politik secara fundamental. Media sosial bukan lagi sekadar saluran distribusi informasi, melainkan telah bertransformasi menjadi arena utama untuk konstruksi, pertunjukan, dan negosiasi identitas politik. Bagi politisi, platform digital menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk menjangkau audien secara langsung, membangun narasi personal dan merespon isu-isu terkini secara *real-time*. (Rifai et al., 2021)

Representasi identitas di media digital melibatkan serangkaian strategi komunikasi yang dirancang untuk membentuk citra yang diinginkan di mata publik. Narasi personal menjadi elemen kunci dalam strategi ini. Politisi berupaya untuk menampilkan sisi humanis mereka, berbagi cerita tentang latar belakang, nilai-nilai pribadi, pengalaman hidup dan motivasi politik. Narasi ini bertujuan untuk membangun koneksi emosional dengan pemilih, menciptakan rasa kepercayaan dan autentisitas. Foto dan video yang menampilkan momen-momen pribadi, kegiatan sehari-hari, atau interaksi dengan keluarga dan komunitas sering kali digunakan untuk memperkuat narasi ini. Selain narasi personal, simbol budaya juga memainkan peran penting dalam representasi identitas digital. Politisi dapat secara strategis menggunakan simbol-simbol budaya lokal atau nasional dalam unggahan, foto profil, *banner* media sosial, atau video kampanye mereka. Penggunaan simbol-simbol ini bertujuan untuk memperkuat ikatan dengan pemilih berdasarkan kesamaan nilai,

tradisi dan identitas kolektif. Misalnya, penggunaan pakaian adat, referensi pada tokoh sejarah lokal, atau partisipasi dalam perayaan budaya dapat menjadi cara untuk membangun citra yang dekat dengan masyarakat. (Aryansyah, 2022)

Interaksi langsung dengan audien merupakan aspek krusial lainnya dalam representasi identitas digital. Media sosial memungkinkan politisi untuk berinteraksi secara langsung dengan pemilih melalui komentar, pesan pribadi, sesi tanya jawab (*live session*), atau jajak pendapat (*polling*). Interaksi ini menciptakan rasa kedekatan dan partisipasi, memungkinkan pemilih merasa didengar dan dihargai. Respon yang cepat dan relevan terhadap komentar atau pertanyaan dapat membangun citra politisi sebagai sosok yang aksesibel, peduli dan responsif.

Representasi identitas di ranah digital juga menghadirkan tantangan tersendiri. Otentisitas menjadi komoditas yang sangat berharga namun sulit dijaga. Pemilih semakin skeptis terhadap citra yang terlalu dipoles atau dibuat-buat. Ketidaksesuaian antara representasi digital dan realitas dapat dengan cepat merusak kredibilitas seorang politisi.

Selain itu, sifat media sosial yang terbuka dan tanpa filter juga membawa resiko. Komentar negatif, ujaran kebencian atau disinformasi dapat dengan mudah menyebar dan merusak citra politisi. Kemampuan untuk mengelola reputasi *online* dan merespon krisis komunikasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting.

Lebih lanjut, algoritma media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk bagaimana identitas politik direpresentasikan dan diterima oleh audien. Konten yang mendapatkan banyak interaksi cenderung lebih sering ditampilkan, menciptakan efek *echo chamber* atau polarisasi. Politisi perlu memahami dinamika algoritma dan mengembangkan strategi konten yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. (Borromeu, Putu Tya Aryantini, Gede Indra Pramana, Tedi Erviantono & Duarte, 2024)

Singkatnya, era digital telah mentransformasi representasi identitas politik, menawarkan peluang besar untuk membangun koneksi dan citra yang kuat, namun juga menghadirkan tantangan terkait otentisitas, manajemen reputasi dan dinamika algoritma media sosial. Politisi yang mampu memanfaatkan platform digital secara strategis dan etis memiliki potensi besar untuk membangun hubungan yang *langgeng* dengan pemilih di era digital ini.

STATE OF THE ART

Penelitian tentang komunikasi politik di Indonesia telah menunjukkan bahwa politisi menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk membangun citra dan kedekatan dengan publik. Beberapa studi relevan antara lain: 1) "Gaya Komunikasi Budaya Dedi Mulyadi", penelitian oleh Muchsin Alfikri (2024) mengkaji gaya komunikasi Dedi Mulyadi yang mengintegrasikan budaya Sunda dalam komunikasi politiknya. Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan budaya lokal dapat meningkatkan kedekatan dengan masyarakat dan membangun citra positif (Muchsin al-Fikri, 2024). 2) "Pola Komunikasi Politik di Media Sosial" oleh Marini Rehanisafira dan Afrita (2021), dengan tujuan menganalisis pola komunikasi politik Dedi Mulyadi di Instagram, menemukan bahwa penggunaan kode tutur yang variatif dan adaptif terhadap konteks sosial memperkuat hubungan dengan audien (Rehanisafira & Afrita, 2021). 3) "Problem Tafsir Semiotika dalam Kajian Media dan Komunikasi" oleh Talani et al. (2021) menyoroti tantangan dalam penafsiran semiotika, khususnya dalam membedakan antara makna denotatif dan konotatif serta pentingnya memahami konteks dalam analisis semiotik (Talani et al., 2023). 4) "Dedi Mulyadi Political Branding in Identifying Sundanese Purwakarta Characters" oleh Nurlimah et al. Artikel jurnal ini mengkaji strategi political branding yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi, Bupati

Purwakarta, dalam upayanya membentuk Purwakarta sebagai kota dengan karakteristik budaya Sunda. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis berbagai kegiatan political branding yang dilakukan Dedi Mulyadi, baik dari kebijakan di berbagai sektor maupun implementasinya di lapangan (Nurlimah et al., 2020).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi telah secara konsisten dan intensif melaksanakan strategi political branding dan kegiatan politik bernuansa Sunda, baik melalui kebijakan maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat secara praktis, interaktif, konsisten, aktif, dan partisipatif. Budaya Sunda diintegrasikan ke dalam visi dan misi pemerintah daerah dan tercermin dalam kebijakan pemerintah daerah di berbagai sektor; pendidikan, pariwisata dan tata ruang. Upaya Mulyadi telah berhasil membangun citra Purwakarta sebagai kota budaya, yang dikenal sebagai "Purwakarta Istimewa".

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan berharga tentang komunikasi politik dan penggunaan simbol budaya, belum banyak studi yang secara khusus menerapkan pendekatan dekonstruksi Derrida dalam menganalisis komunikasi politik di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan analisis semiotik dekonstruktif terhadap gaya komunikasi publik Dedi Mulyadi, guna memahami kompleksitas makna dan representasi identitas dalam konteks politik Indonesia. Inilah *gap research* dari tema gaya komunikasi Dedi Mulyadi.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotik dekonstruktif Jacques Derrida. Pendekatan kualitatif dipilih untuk penelitian ini karena fokus utamanya adalah pada pemaknaan, bukan pengukuran. Dalam kajian komunikasi politik, pemaknaan dari simbol, diksi dan gestur jauh lebih penting daripada data numerik atau statistik. Penelitian ini bersifat deskriptif-interpretatif, bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami struktur makna dalam praktik komunikasi simbolik dan kultural yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi, khususnya dalam konteks digital yang melibatkan platform YouTube. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana simbol-simbol yang digunakan Dedi Mulyadi menciptakan makna yang berkembang dalam masyarakat, serta bagaimana hal itu berhubungan dengan identitas politiknya.

Penelitian ini mengumpulkan dua jenis data utama. Data primer terdiri dari konten video, unggahan media sosial (YouTube). Data ini penting karena mencerminkan komunikasi langsung yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi di ruang publik digital, yang berfungsi sebagai wadah untuk membangun citra dirinya. Data sekunder meliputi jurnal, dokumentasi akademik dan publikasi sebelumnya yang mengulas figur Dedi Mulyadi. Adapun sumber primer yang dimaksud adalah 3 (tiga) video dari KANG DEDI MULYADI CHANNEL berikut:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=qgm7f9GbYcQ>, "DI CIREBON - 3 AN4K SATU KAMAR - ISTRINYA INGIN BER-KB | PUNYA 7 AN4K INGIN VASEKTOMI".
2. <https://www.youtube.com/watch?v=I3pHsNAzGtY>, "INI PENJELASAN KDM PADA REMAJA YANG KECEWA KARENA RUMAHNYA DIBONGKAR"
3. <https://www.youtube.com/watch?v=ay4YWMgmpAU>, "MESKI DITAWAR DENGAN HARGA 15 JUTA - KI ATUN MENOLAK MENJUAL KARUNG RUMPUTNYA"

Pemilihan tiga video tersebut didasarkan pada prinsip representativitas tematik dan komunikatif. Setiap video menampilkan konteks sosial berbeda, yakni persoalan keluarga dan kependudukan, konflik sosial akibat kebijakan publik, serta etika ekonomi rakyat kecil yang secara

keseluruhan menggambarkan spektrum gaya komunikasi wirausaha, populis, dan humanistik yang menjadi ciri khas Dedi Mulyadi. Dengan demikian, ketiga video ini merepresentasikan variasi pesan dan simbol politik kultural yang muncul dalam narasi keseharian kanal tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Observasi non-partisipatif dilakukan dengan mengamati secara saksama konten digital yang diproduksi oleh Dedi Mulyadi di YouTube. Selanjutnya, dokumentasi digunakan untuk mengarsipkan transkrip, visual dan audio dari video yang menjadi bahan analisis. Berikutnya, studi pustaka dengan mengkaji teori-teori semiotika, komunikasi politik dan budaya populer yang relevan untuk memberikan landasan teori yang relevan dalam analisis.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur untuk mengungkap makna-makna yang tersembunyi dalam komunikasi publik Dedi Mulyadi. Identifikasi tanda adalah langkah pertama, yang bertujuan untuk mengidentifikasi simbol-simbol budaya, diksi, dan gestur yang muncul dalam komunikasi publik Dedi Mulyadi. Simbol-simbol ini akan dianalisis untuk memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan serta konteks sosial budaya yang melatarbelakanginya. Dekonstruksi teks dan visual menjadi tahapan kedua, di mana peneliti menggunakan prinsip dekonstruksi Derrida untuk membongkar oposisi biner dalam konten komunikasi yang ada. Misalnya, oposisi antara rakyat dan elite, kesederhanaan dan kekuasaan, serta berbagai oposisi lainnya, yang berfungsi untuk melihat ketidakkonsistenan dan makna alternatif yang dapat muncul dari komunikasi tersebut. Interpretasi kontekstual adalah tahapan berikutnya, di mana makna tanda-tanda akan dianalisis berdasarkan konteks sosial-budaya lokal, dalam hal ini adalah budaya Sunda, serta konteks politik nasional dan digital yang lebih luas. Akhirnya, penyusunan narasi makna dilakukan untuk menyusun temuan-temuan analisis menjadi narasi yang komprehensif mengenai gaya komunikasi yang ambigu, cair, dan populis yang diperlihatkan oleh Dedi Mulyadi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa gaya komunikasi Dedi Mulyadi dalam tiga video terpilih memperlihatkan pola semiotika populisme kultural, yakni penggunaan simbol-simbol lokal dan bahasa keseharian untuk membangun kedekatan emosional dengan khayal. Misalnya, dalam video “3 Anak Satu Kamar” tampak konstruksi simbolik yang menampilkan Dedi sebagai figur pemimpin yang *nguwongke wong*, pemimpin yang merakyat dan menempatkan empati sebagai dasar kebijakan sosial. Dalam video “Remaja yang Kecewa Karena Rumahnya Dibongkar”, ia memosisikan diri sebagai mediator moral antara negara dan rakyat kecil, sedangkan pada “Karung Rumput 15 Juta” muncul simbol penolakan terhadap materialisme dan penghormatan pada etos kerja rakyat. Secara semiotik, ketiganya mengonstruksi narasi kepemimpinan berbasis etika sosial dan spiritualitas Jawa-Sunda yang berfungsi memperkuat *brand image* politiknya sebagai tokoh nasionalis religius.

Temuan ini sejalan dengan kecenderungan komunikasi politik di Asia Tenggara yang menonjolkan populisme berbasis budaya lokal. Sebagai pembanding, studi oleh (Suppiah et al., 2022) mengenai representasi visual Mahathir Mohamad di Malaysia menunjukkan bagaimana simbol keagamaan dan kesederhanaan digunakan untuk menegaskan legitimasi moral pemimpin. Demikian pula, (Taneerat & Dongnadeng, 2024) menemukan bahwa dalam wacana digital Thailand, tokoh politik menggunakan narasi budaya untuk membangun citra “pahlawan rakyat” yang seolah melampaui struktur partai. Dibandingkan dengan dua studi tersebut, Dedi Mulyadi

menggabungkan narasi moral, kearifan lokal, dan pendekatan ekologis yang menjadikan pesan politiknya unik di ranah digital Indonesia. Pendekatan semiotik-dekonstruktif dalam penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan utama komunikasinya tidak hanya pada *apa* yang dikatakan, tetapi pada *bagaimana* tanda-tanda sederhana direproduksi sebagai simbol moralitas politik.

Perlu diakui adanya keterbatasan interpretasi dalam analisis ini. Tafsir semiotik dan dekonstruktif sangat bergantung pada kepekaan peneliti terhadap konteks sosial dan kultural, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya universal atau bebas nilai. Interpretasi terhadap tanda dan narasi Dedi Mulyadi juga dipengaruhi oleh latar ideologis, pengetahuan lokal, dan asumsi hermeneutik peneliti. Selain itu, keterbatasan jumlah sampel (tiga video) membatasi generalisasi terhadap keseluruhan strategi komunikasi Dedi Mulyadi di ruang digital.

Hasil Penelitian

1. Video: "DI CIREBON - 3 AN4K SATU KAMAR - ISTRINYA INGIN BER-KB | PUNYA 7 AN4K INGIN VASEKTOMI", Tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=qgm7f9GbYcQ>.

Dalam video ini, Dedi Mulyadi mengunjungi sebuah keluarga di Cirebon yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Melalui pendekatan yang santai dan menggunakan logat Sunda, ia berdialog dengan pasangan suami istri mengenai rencana mereka untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

Analisis Dekonstruktif: 1) Oposisi Biner. Video ini menampilkan oposisi antara "kemiskinan" dan "kesadaran akan kesehatan reproduksi". Dedi Mulyadi, sebagai figur publik, hadir untuk menjembatani kesenjangan ini. 2) Dekonstruksi Makna. Dengan menggunakan bahasa lokal dan pendekatan yang humanis, Dedi Mulyadi mendekonstruksi stigma bahwa masyarakat miskin tidak peduli terhadap kesehatan reproduksi. Ia menunjukkan bahwa kesadaran tersebut ada, namun akses dan informasi yang terbatas menjadi hambatan utama. 3) Implikasi Politik. Interaksi ini mencerminkan strategi komunikasi politik yang membaur dengan masyarakat, mengaburkan batas antara elit dan rakyat. Dedi Mulyadi tidak hanya sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai fasilitator dialog yang setara.

Video ini menyuguhkan sebuah realitas sosial kelas bawah yang kompleks, di mana isu kemiskinan, kepadatan penduduk, dan kesehatan reproduksi bertemu dalam satu ruang naratif. Dedi Mulyadi, sebagai figur publik yang juga politisi, hadir dalam ruang domestik warga dengan membawa gaya komunikasi yang cair, santai, dan akrab, menggunakan logat Sunda sebagai strategi kedekatan kultural. Dalam kacamata semiotik Derrida, kemunculan tanda-tanda seperti *satu kamar sempit berisi tiga anak, istri yang ingin ber-KB*, serta *keinginan sang suami untuk vasektomi* merepresentasikan simbol-simbol sosial yang sarat dengan ambiguitas makna. Di satu sisi, mereka dapat dimaknai sebagai tanda keterdesakan ekonomi dan ketidakterjangkauan fasilitas kesehatan yang memadai. Namun di sisi lain, dalam kerangka dekonstruktif, makna-makna ini tidaklah tetap dan tunggal; mereka terbuka untuk pembacaan ganda, termasuk sebagai bentuk resistensi kultural terhadap struktur negara yang gagal menyediakan akses KB secara merata.

Ketika Dedi Mulyadi berbicara dengan pasangan tersebut, ia tidak memposisikan diri sebagai pejabat yang menggurui, melainkan sebagai "warga yang kebetulan tahu lebih dulu," strategi ini mendobrak oposisi biner antara *yang berkuasa* dan *yang dikuasai*. Dalam narasi komunikasi publik konvensional, tokoh elite sering tampil di atas panggung, sementara rakyat adalah audiens pasif. Namun melalui dekonstruksi Derrida, relasi ini diretas: Dedi justru menjadi medium tempat si rakyat mengekspresikan diri, dengan realitas mereka yang tidak

dipoles atau direduksi. Konteks logat, gestur, dan dialog emosional dibaca sebagai *tanda-tanda kultural* yang membentuk citra Dedi Mulyadi sebagai figur populis yang bukan hanya memahami realitas rakyat, tetapi menjadi bagian dari narasi itu sendiri.

Lebih jauh, makna “ingin vasektomi” tidak hanya berbicara soal pengendalian kelahiran secara biologis, tetapi juga mencerminkan kontradiksi sosial yang lebih dalam: bahwa dalam kondisi ekonomi lemah, justru muncul kesadaran akan tanggung jawab keluarga, yang seringkali tidak muncul dalam narasi elite politik yang mapan. Di sinilah kerja dekonstruksi berlangsung: makna kebijakan KB yang selama ini dianggap domain negara, dalam video ini diambil alih oleh narasi akar rumput. Maka, kehadiran Dedi tidak hanya mendistribusikan informasi, melainkan merepresentasikan *penjungkirbalikan struktur naratif*, di mana rakyat miskin menjadi aktor utama dalam percakapan kebijakan. Dengan demikian, video ini tidak hanya menampilkan realitas, tetapi juga *membongkar ulang struktur makna tentang siapa yang berhak bicara, siapa yang didengarkan dan bagaimana kekuasaan dikomunikasikan secara simbolik*.

2. Video: "INI PENJELASAN KDM PADA REMAJA YANG KECEWA KARENA RUMAHNYA DIBONGKAR", Tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=I3pHsNAzGtY>.

Dalam video ini, Dedi Mulyadi berdialog dengan seorang remaja yang kecewa karena rumahnya dibongkar dalam program normalisasi sungai. Ia menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut dan mendengarkan keluhan dari remaja tersebut.

Analisis Dekonstruktif: 1) Oposisi Biner. Terdapat oposisi antara "kebijakan pemerintah" dan "kepentingan individu". Dedi Mulyadi berperan sebagai mediator yang mencoba menyatukan dua kepentingan yang tampaknya bertentangan. 2) Dekonstruksi Makna. Dengan mendengarkan langsung keluhan warga dan memberikan penjelasan yang transparan, Dedi Mulyadi mendekonstruksi citra pemerintah yang otoriter dan tidak peduli terhadap warganya. Ia menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat dibicarakan dan dinegosiasikan secara humanis. 3) Implikasi Politik. Pendekatan ini memperlihatkan strategi komunikasi yang menekankan pada partisipasi dan dialog, bukan hanya pada penyampaian informasi satu arah. Hal ini menciptakan ruang publik yang lebih inklusif dan demokratis.

Dalam video ini, Dedi Mulyadi tampil bukan hanya sebagai figur publik, tetapi juga sebagai representasi negara yang hadir langsung untuk merespons kekecewaan seorang remaja akibat penggusuran rumahnya. Secara simbolik, video ini mengandung oposisi biner antara *otoritas negara vs rakyat kecil, kuasa kebijakan vs perasaan kehilangan*, serta *narasi pembangunan vs identitas komunitas*. Derrida mengajarkan bahwa setiap struktur oposisi selalu mengandung keretakan dan potensi pembalikan makna. Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi tidak sekadar menjelaskan alasan penggusuran, tetapi membongkar narasi kekuasaan dengan pendekatan empatik dan kultural. Ia memilih duduk di samping remaja tersebut, mendengarkan keluhannya, lalu menyampaikan alasan penggusuran dengan narasi *gotong royong*, bukan *represi*.

Dekonstruksi makna terjadi ketika Dedi mengatakan bahwa tanah itu milik negara dan digunakan untuk kepentingan bersama. Pernyataan ini, dalam logika kekuasaan formal, merupakan legitimasi atas tindakan penggusuran. Namun, ketika disampaikan dengan gestur lembut, nada rendah, dan menggunakan bahasa daerah, makna tersebut berubah menjadi bentuk komunikasi yang *memanusiakan kebijakan*. Di sinilah Derrida menekankan bahwa makna tidak bersifat tetap; tanda “penggusuran” yang biasanya identik dengan kekerasan dan konflik, dalam

video ini berubah menjadi *kesempatan dialog*. Makna itu mengalami *pencairan*, menjadi ambigu, terbuka bagi interpretasi yang lebih lunak dan partisipatif.

Lebih jauh, dalam interaksinya, Dedi menyelipkan kisah-kisah lokal dan nilai kultural Sunda sebagai bentuk *re-encoding* komunikasi politik. Ia menyentuh sisi emosional remaja dengan menyeimbangkan antara logika dan rasa, strategi yang mencerminkan komunikasi publik berbasis nilai lokal. Hal ini membongkar mitos bahwa narasi kebijakan harus formal dan teknokratis. Justru, dalam pendekatan Dedi, narasi kebijakan menjadi *narasi keseharian*, di mana masyarakat diajak terlibat secara emosional. Tindakan mendengarkan, menatap mata lawan bicara, dan tidak mendominasi percakapan adalah *tanda-tanda simbolik* yang dalam analisis Derrida merupakan bentuk *anti-hierarki* dalam komunikasi publik.

Secara keseluruhan, video ini merepresentasikan bagaimana komunikasi politik bisa didekonstruksi dari bentuknya yang kaku menjadi cair, dari dominasi menjadi partisipasi, dan dari narasi satu arah menjadi dialektika makna yang terbuka. Dalam dunia digital yang sarat simbol, video ini menunjukkan bahwa *kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh posisi institusional, tetapi oleh performativitas simbolik* yang membentuk persepsi publik.

3. Video: "MESKI DITAWAR DENGAN HARGA 15 JUTA - KI ATUN MENOLAK MENJUAL KARUNG RUMPUTNYA", Tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=ay4YWMgmpAU>

Dalam video ini, Dedi Mulyadi bertemu dengan Ki Atun, seorang petani yang menolak menjual karung rumputnya meskipun ditawar dengan harga tinggi. Interaksi ini menggambarkan nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan yang dijunjung oleh masyarakat pedesaan.

Analisis Dekonstruktif: 1) Oposisi Biner. Video ini menampilkan oposisi antara "nilai material" dan "nilai moral". Ki Atun memilih untuk mempertahankan integritasnya daripada menerima uang dalam jumlah besar. 2) Dekonstruksi Makna. Melalui interaksi ini, Dedi Mulyadi mendekonstruksi pandangan bahwa semua orang dapat dibeli dengan uang. Ia menyoroti bahwa nilai-nilai tradisional seperti kejujuran dan kesederhanaan masih kuat dipegang oleh masyarakat. 3) Implikasi Politik. Dengan menampilkan kisah ini, Dedi Mulyadi memperkuat citranya sebagai pemimpin yang menghargai nilai-nilai lokal dan tradisional, serta mendekatkan dirinya dengan masyarakat akar rumput.

Dalam video ini, pertemuan antara Dedi Mulyadi dan seorang petani tua bernama Ki Atun menjadi panggung simbolik yang sarat oposisi biner antara *materi vs nilai, logika kapitalisme vs etika kerja*, serta *modernitas vs tradisi*. Ketika Dedi Mulyadi mencoba membeli karung rumput milik Ki Atun dengan harga fantastis (15 juta rupiah), penolakan yang dilakukan oleh Ki Atun bukan semata penolakan terhadap uang, melainkan simbol perlawanannya terhadap narasi kapitalistik yang cenderung memaksakan pertukaran nilai ekonomi atas segala sesuatu.

Dalam perspektif semiotika Derrida, penolakan itu membongkar *hierarki makna* antara harga dan kehormatan. Biasanya, dalam logika pasar, harga tinggi diasosiasikan dengan nilai tinggi. Namun, melalui aksi dan diksi sederhana seperti "rumput ini untuk ternak saya," Ki Atun mendekonstruksi logika tersebut: *yang bernilai bukan uang, melainkan fungsi, tanggung jawab, dan harga diri*. Dengan demikian, tanda "karung rumput" tidak hanya menjadi objek material, tetapi juga *simbol relasi sosial dan etika kerja tradisional* yang tidak bisa diukur dengan uang.

Derrida menjelaskan bahwa setiap makna selalu bersifat tidak tetap (*deferral*) dan saling bertentangan. Dalam hal ini, Dedi Mulyadi yang biasanya diposisikan sebagai *pemberi* (kuasa), justru mengalami *subversi makna* ketika ia ditolak oleh orang biasa. Oposisi antara pejabat vs rakyat dibalikkan: Ki Atun tidak inferior, melainkan menjadi *otoritas moral* dalam interaksi tersebut. Ini adalah contoh konkret dari *anti-struktur Derridean*, di mana hierarki sosial yang mapan terurai dan ditantang oleh moralitas lokal yang tidak tunduk pada uang maupun kekuasaan.

Gestur-gestur Dedi Mulyadi dalam merespon penolakan itu, tersenyum, tertawa, menyimak, menjadi bagian dari *tanda-tanda cair* yang membuka ruang interpretasi baru tentang relasi kuasa. Ia tidak memaksakan kehendak, tetapi membiarkan makna berkembang dari interaksi, bukan dominasi. Hal ini menunjukkan bagaimana komunikasi politik berbasis lokal dapat melahirkan *etos populis yang non-populis*, yaitu etos yang tidak mengeksplorasi penderitaan atau kemiskinan, melainkan merayakan keberdayaan warga akar rumput.

Dengan latar pedesaan, bahasa Sunda yang digunakan, serta fokus kamera yang mendekatkan audiens pada ekspresi wajah Ki Atun, video ini tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga *membangun ruang partisipasi makna* antara penonton dan narasi lokal. Dalam kerangka Derrida, ini merupakan *dekonstruksi terhadap estetika politik digital yang umumnya menekankan dramatisasi dan visualisasi kekuasaan*. Sebaliknya, video ini merayakan kesahajaan dan *keaslian simbolik* sebagai fondasi legitimasi politik.

Pembahasan

Melalui analisis semiotik dekonstruktif terhadap ketiga video tersebut, terlihat bahwa Dedi Mulyadi menggunakan strategi komunikasi yang membaur dengan masyarakat, mengaburkan batas antara elit dan rakyat serta menekankan pada nilai-nilai lokal dan tradisional. Pendekatan ini menciptakan ruang publik yang lebih inklusif dan demokratis, serta memperkuat citranya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.

Analisis ini menunjukkan bahwa komunikasi publik tidak hanya tentang penyampaian pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan tersebut dikonstruksi dan diterima dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik. Dengan menggunakan pendekatan dekonstruktif Derrida, kita dapat memahami kompleksitas dan ambiguitas dalam komunikasi politik serta pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dalam membangun narasi politik yang efektif.

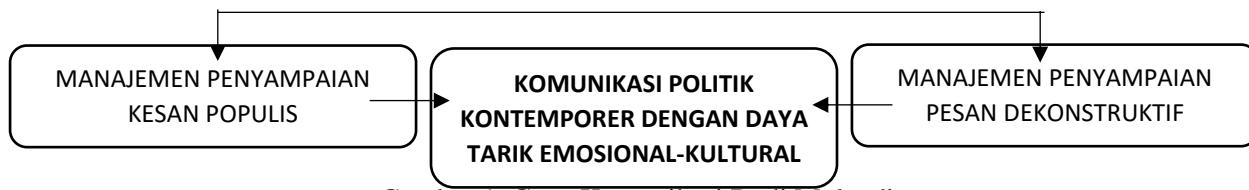
Dari ketiga video yang dianalisis, terbentuk narasi komunikasi politik yang khas dari figur Dedi Mulyadi. Narasi ini tidak dibangun melalui retorika elitis atau wacana formal kekuasaan, melainkan melalui representasi interaksi sehari-hari bersama masyarakat akar rumput. Dalam kerangka dekonstruksi Derrida, gaya komunikasi Dedi Mulyadi memperlihatkan pembongkaran terhadap oposisi-oposisi biner dalam politik konvensional, seperti antara rakyat vs pejabat, miskin vs kaya, dan kuasa vs subjek.

Pada video pertama, simbol tubuh dan ruang privat digunakan untuk mempermasalahkan etika publik terhadap kontrol kelahiran. Dedi menjadi simbol ambiguitas antara negara yang mengintervensi dan figur “bapak” yang mendengarkan. Dalam video kedua, ia menjadi mediasi antara trauma dan harapan anak muda miskin, mengaburkan batas antara kekuasaan formal dengan empati personal. Sementara itu, video ketiga menampilkan kekuatan moral warga yang menolak tawaran uang besar demi etos kerja dan nilai tradisional. Tindakan tersebut secara dekonstruktif membalikkan relasi kuasa: rakyat menjadi aktor penentu makna, bukan objek representasi politik.

Ketiga video ini secara konsisten menunjukkan praktik komunikasi politik yang *cair, ambigu, dan penuh pembacaan ganda*. Komunikasi yang dibangun Dedi Mulyadi tidak mengandalkan simbol negara, tetapi simbol-simbol budaya lokal Sunda: bahasa, nilai kekeluargaan, dan gestur sosial. Dalam konteks ini, narasi yang dibentuk bukan sekadar “politik bantuan” atau “politik performatif,” tetapi *politik simbolik kultural* yang membiarkan makna tumbuh dari interaksi.

Pendekatan semiotik Derrida memungkinkan komunikasi untuk melihat bahwa pesan-pesan dalam video ini selalu *menunda makna final (deferred meaning)*. Tidak ada pesan tunggal yang definitif; setiap penonton bisa menafsirkan ulang makna moralitas, kuasa, dan nilai berdasarkan pengalaman masing-masing. Dalam ranah komunikasi publik digital, ini merupakan bentuk *populisme simbolik* yang berakar bukan pada wacana ideologis, melainkan pada nilai-nilai relasional dan performatif budaya.

Dengan demikian, temuan sementara menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi mengembangkan gaya komunikasi yang tidak hanya populis dalam bentuk, tetapi juga dekonstruktif dalam isi. Ia menolak untuk direduksi sebagai elit, tetapi juga tidak berpura-pura menjadi rakyat biasa. Gaya ini menempatkannya sebagai *figur antara (liminal figure)*, mengaburkan batas antara pemimpin dan yang dipimpin, antara narator dan objek narasi. Inilah bentuk komunikasi politik kontemporer yang menghindari struktur kaku, membuka kemungkinan makna, dan membangun kedekatan emosional dengan konstituen melalui *mediasi budaya dan simbolik*.



Gambar 1. Gaya Komunikasi Dedi Mulyadi

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Gambar 1 mengilustrasikan gaya komunikasi Dodi Mulyadi melalui tiga elemen utama: manajemen kesan populis, manajemen pesan destruktif dan komunikasi politik kontemporer dengan daya tarik emosional-kultural. Ketiganya saling terhubung, menunjukkan pendekatan yang kompleks dan liminal dalam membangun citra politik yang dekat dengan rakyat namun tetap kritis terhadap struktur kekuasaan.

Implikasi Teoretis

1. Kontribusi terhadap Kajian Semiotika Politik dan Budaya Lokal. Temuan ini memperluas kajian semiotika politik dengan mengintegrasikan konteks budaya lokal sebagai medan produksi dan konsumsi makna. Gaya komunikasi Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa tanda politik tidak hanya berasal dari simbol-simbol negara (bendera, institusi, jargon formal), melainkan juga dari simbol keseharian yang melekat dalam kebudayaan masyarakat, seperti bahasa daerah, perilaku lisan-nonverbal, dan ritual sosial.
2. Dekonstruksi terhadap Oposisi Biner dalam Komunikasi Politik. Dalam kerangka Derrida, analisis ini menunjukkan bahwa praktik komunikasi politik yang dibangun Dedi Mulyadi justru efektif karena menggugat dan mengaburkan oposisi biner seperti rakyat vs elite, bantuan vs eksploitasi, dan kepedulian vs pencitraan. Ambiguitas yang ditampilkan bukan kelemahan, melainkan strategi komunikasi untuk membangun *meaning openness* dalam benak khalayak.

3. Politik Sebagai Praktik Performatif. Penelitian ini menegaskan pentingnya melihat politik sebagai *praktik performatif*, bukan sekadar aktivitas institusional. Dedi Mulyadi tidak sekadar berbicara politik, melainkan *memperankan politik* dalam keseharian rakyat kecil. Ini merepresentasikan konsep *political performativity*, di mana makna dan identitas politik dibentuk melalui tindakan-tindakan simbolik yang dapat dipahami dan dirasakan oleh publik.
4. Relevansi Semiotika Derrida dalam Era Komunikasi Digital. Pendekatan dekonstruktif menunjukkan fleksibilitasnya untuk membongkar teks digital yang bersifat visual, auditif, dan multimodal. Gaya komunikasi Dedi Mulyadi dalam video YouTube, TikTok, dan Instagram memperlihatkan bahwa makna dalam era digital tidak stabil, terus berubah, dan sangat tergantung pada interpretasi kontekstual audiens yang beragam.

Implikasi Praktis

1. Strategi Komunikasi Politik Digital. Politisi atau tokoh publik yang ingin membangun kedekatan dengan masyarakat digital dapat mempelajari model komunikasi Dedi Mulyadi: merakyat bukan karena retorika, tetapi karena kedalaman simbolik yang dimunculkan secara konsisten melalui bahasa, tindakan, dan empati kultural. Ini sangat penting dalam era post-truth, ketika emosi dan simbol sering lebih kuat dari data atau argumentasi.
2. Pembangunan Citra Publik Berbasis Budaya Lokal. Komunikasi Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa pencitraan bukan berarti manipulasi, tetapi bisa menjadi cara untuk merawat identitas dan nilai lokal. Pencitraan berbasis budaya tidak hanya membuat seorang tokoh diterima, tetapi juga memperkuat legitimasi sosialnya karena dianggap “bagian dari kita.”
3. Pendidikan Literasi Politik di Kalangan Akar Rumput. Model komunikasi Dedi bisa diadaptasi dalam program literasi politik dengan pendekatan budaya, agar rakyat tidak hanya menjadi objek kampanye tetapi subjek yang mengerti makna simbolik dari tindakan politik. Ini juga membuka ruang bagi pemahaman politik berbasis pengalaman hidup sehari-hari, bukan hanya teori elitis.
4. Desain Komunikasi Pemerintahan yang Humanis. Gaya Dedi dapat menginspirasi desain komunikasi publik yang lebih humanis, terutama dalam pelayanan publik. Alih-alih formalistik, birokrasi dapat mengembangkan narasi dan visual yang bersifat dialogis, inklusif, dan membumi dalam menyampaikan program atau kebijakan.

Kesimpulan

Gaya komunikasi publik Dedi Mulyadi membentuk narasi politik kultural yang unik melalui strategi simbolik yang berakar pada kedekatan budaya lokal, empati sosial, serta gaya tutur yang sederhana namun penuh makna. Analisis semiotik-dekonstruktif menunjukkan bahwa pesan-pesan politik yang dibangun Dedi Mulyadi bersifat multi-interpretatif dan cair, membuka ruang tafsir bagi publik untuk mengonstruksi makna sendiri atas figur dan gagasannya. Ketiga video yang dianalisis memperlihatkan konsistensi penggunaan simbol-simbol lokal, bahasa Sunda, ritual sosial, dan interaksi keseharian yang secara efektif mendekonstruksi oposisi biner antara *elit* dan *rakyat*, *formalitas* dan *keintiman*. Figur Dedi tampil sebagai jembatan simbolik antara kekuasaan dan rakyat, menghadirkan politik sebagai ruang representasi budaya dan empati sosial.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan pendekatan semiotika politik berbasis konteks lokal Indonesia, serta penerapan dekonstruksi Derrida untuk membaca dinamika makna dalam komunikasi digital politik. Hal ini menambah khazanah teori komunikasi politik kontemporer yang sebelumnya didominasi perspektif Barat. Sementara kontribusi praktis

penelitian ini menunjukkan bahwa gaya komunikasi berbasis kultural dan emosional dapat menjadi strategi efektif bagi aktor politik dan pemerintah dalam membangun kepercayaan publik di era digital yang sarat ketidakpastian makna dan krisis legitimasi.

Daftar Pustaka

- Agis, D. F. (2022). Jacques Derrida: Deconstruction and Law. *Anales de La Catedra Francisco Suarez*, 56. <https://doi.org/10.30827/acfs.v56i.17354>
- Anshori, I. (2018). Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial Isa Anshori Universitas Islam Negeri Sunan Ampel , Jl . Ahmad Yani No . 117 , Jemur Wonosari Surabaya , Paradigma Fenomenologi (Phenomenology) merupakan salah satu teori dari paradigma. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 2(2), 165–181. <https://doi.org/10.21070/halaqa>.
- Arif, J. M., & Jawad, H. N. (2020). Semiotics in political discourse. An analytical treatment of political text criticisms since 2003: The case of the discourse of prime minister nouri al-maliki. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1867–1870. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.214>
- Aryansyah, J. (2022). Analisis Gaya Kampanye Komunikator Politik (Prabowo Subianto). *Researchgate.Net, April*.
- Borromeu, Putu Tya Aryantini, Gede Indra Pramana, Tedi Erviantono, E. F., & Duarte. (2024). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK POLITIK: STUDI KASUS KAMPANYE PEMILU 2024. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(5).
- Erly Hasim. (2016). *Peran Komunikasi Partai Politik Dalam Proses Rekrutmen Kader Perempuan Pada Partai Politik Aceh*. July, 1–23.
- Fitri, A. N., & Adeni, A.-. (2020). Jokowi dan Kekuatan Pencitraan Diri Serta Relasinya Dengan Umat Islam. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 19(2), 1. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v19i2.3503>
- Irawatinningrum, S. (2020). Personal Branding Caleg Melalui Media Sosial. *Lingkar Studi Komunikasi (LISKI)*, 6(Vol 6 No 2 (2020): SEPTEMBER 2020), 107–115.
- Koci, M. (2019). Transforming Representation: Jacques Derrida and the End of Christianity. In *Open Theology* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/10.1515/opth-2019-0018>
- Krisnayana, R. (2016). Komunikasi Lintas Budaya Dan Fakta Etnis Cina Di Indonesia Sebagai Bukti Komunikasi Lintas Budaya. *DIALEKTIKA Volume 3 No. 2. September 2016*, 3(2).
- Lewar, P. P., & Ndegong Madung, O. G. (2022). Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas. *Jurnal Ledalero*, 21(2), 150. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161>
- Muchsin al-Fikri. (2024). GAYA KOMUNIKASI BUDAYA DEDI MULYADI DALAM MEWUJUDKAN JABAR ISTIMEWA. *Buana Komunikasi: Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi*, 05(02), 133–140. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/buanakomunikasi>
- Normandin, S. (2023). Squaring “The rhetoric of temporality”: Greimassian semiotics and de Manian deconstruction. *Sign Systems Studies*, 51(3–4), 538–564. <https://doi.org/10.12697/SSS.2023.51.3-4.03>
- Nurlimah, N., Hirzi, A. T., Kamila, L., & Fitriastuti, N. (2020). Dedi Mulyadi Political Branding in Identifying Sundanese Purwakarta Characters. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 13(1), 21–30. <https://doi.org/10.29313/mediator.v13i1.5347>
- Rehanisafira, M., & Afnita, A. (2021). Pola Komunikasi Politik Pada Akun Media Sosial Instagram

- Dedi Mulyadi Perspektif Sosiolinguistik. *Jurnal Ilmiah Bina Bahasa*, 14(2), 151–160. <https://doi.org/10.33557/binabahasa.v14i2.1517>
- Rifai, Z., Faqih, H., & Dwi, M. (2021). Metode SOSTAC Untuk Penyusunan Strategy Digital Marketing pada UMKM Dalam Menghadapi Pandemi dan Pasca Pandemi. *Jurnal Sains Manajemen*, 9(1), 1–13.
- Roslyng, B. B. B. & M. M. (2022). Rethinking digital activism: The deconstruction, inclusion, and Bolette B . Blaagaard & Mette Marie Roslyng. *MedieKultur / Journal of Media and Communication Research*, 38(72), 45–64. <https://doi.org/10.7146/mk.v38i72.125721>
- Ruhupatty, C. (2021). Dekonstruksi Derrida terhadap Humanisme Barat. *Dekonstruksi*, 4(01). <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v4i01.58>
- Salmon, P. (2023). Introducing Derrida. *Think (UK)*, 22(65). <https://doi.org/10.1017/S147717562300026X>
- Sarazqiah, S., Pribadi, A., Wulansari, W., & Sari, Y. (2025). Strategi Komunikasi Gubernur Kepulauan Riau Dalam Membangun Rumah Singgah Di Jakarta. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 7(2), 90–101. <https://doi.org/10.32509/petanda.v7i2.5037>
- Sedighi, M., Sheikh, A., Tourani, N., & Bagheri, R. (2022). *Service Delivery and Branding Management in Digital Platforms: Innovation through Brand Extension*. <https://doi.org/10.1155/2022/7159749>
- Segovia, C. (2019). The non dialectical Différence in the early texts of Jacques Derrida. *Endoxa*, 44. <https://doi.org/10.5944/endoxa.44.2019.20412>
- Suppiah, S. M., Ahmad, M. K., & Velloo, P. (2022). Tun Mahathir Mohamad's Leadership Communication as the Essence of Social Change: What the Malaysian Hindus' Opinion Leaders Say? *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 38(3), 37–53. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2022-3803-03>
- Talani, N. S., Kamuli, S., & Juniarti, G. (2023). Problem tafsir semiotika dalam kajian media dan komunikasi: Sebuah tinjauan kritis. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 9(1), 103. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v9i1.3407>
- Taneerat, W., & Dongnadeng, H. A. (2024). Digital Political Trends and Behaviors among Generation Z in Thailand. *Southeast Asian Studies*, 13(3), 521–545. https://doi.org/10.20495/seas.13.3_521